

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, maka kesimpulan yang didapat penulis dari judul “Waktu Tunggu Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Kesimpulan dari rumusan masalah pertama

Waktu tunggu eksekusi mati yang berkepanjangan bahkan sampai bertahun-tahun merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hukum positif yang dilanggar dalam waktu tunggu eksekusi pidana mati tersebut adalah Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa : **setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia.** Pelanggaran Hak Asasi tersebut berkaitan dengan jenis penghukuman yang harus diterima oleh terpidana mati

yaitu hukuman ganda (*double punishment*). Dimana setelah dijatuhi pidana mati dan sambil menunggu eksekusi, terpidana masih harus ditahan dalam penjara bahkan sampai menghabiskan waktu yang sangat lama tanpa adanya kepastian hukum.

Kemudian selama masa tunggu tersebut juga membuat hak kebebasan terpidana dibatasi. Saat menunggu eksekusi, terpidana mati dimasukkan ke ruang isolasi yang sangat sempit dan jauh dari suasana nyaman (kasus zainal abidin). Waktu tunggu eksekusi yang berkepanjangan juga menimbulkan siksaan secara psikologi walaupun tidak dalam arti yuridis, namun menunggu yang begitu lama bahkan sampai berpuluh-puluh tahun bisa membuat mental terpidana terganggu. Hal ini disebabkan karena para terpidana hidup dalam tekanan dan ketidakpastian mengenai kapanakah ajal akan menjemput mereka. (*kasus Rodrigo Gualarte dan Marco Cardoso Moreira dieksekusi dalam kondisi gangguan jiwa dan mental tidak stabil*). Dan yang paling sering dilupakan adalah dampak dari eksekusi mati tersebut terhadap keluarga dari terpidana mati, seringkali waktu tunggu eksekusi tersebut juga membuat keluarga terpidana mati ikut serta merasakan penyiksaan yang

dihasilkan dari penantian eksekusi tersebut. Dari yang awalnya hanya beberapa bagian keluarga saja yang merasakan, lama kelamaan turunan dari terpidana itu juga mau tidak mau harus ikut merasakan dampaknya.

2. Kesimpulan dari rumusan masalah kedua

Mengenai upaya hukum peninjauan kembali yang sebelumnya diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali”, telah dicabut dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan kembali yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari sekali. Hal ini justru berpotensi memperpanjang waktu eksekusi pidana mati.

Dikatakan berpotensi memperpanjang waktu tunggu eksekusi mati karena jika sekali terpidana mengajukan PK dan ditolak maka terpidana masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan PK berikutnya lagi begitu seterusnya sehingga tidak terjaminnya kepastian hukum. Seperti dalam beberapa kasus yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, putusan peninjauan kembali yang lebih dari sekali tersebut sering dimanfaatkan oleh beberapa terpidana

seperti Mary Jane, Okonkwo Nongso Kingsley, Michael Titus Igweh dan sebagian lainnya mengajukan PK kedua karena adanya *novum* yang tidak ditemukan dalam PK pertama tetapi tetap saja semuanya ditolak oleh MA.

Mengenai PK yang dikeluarkan oleh Mahkamah tersebut dianggap tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga pada tahun 2014 MA mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali. SEMA ini justru dianggap sebuah pembangkangan dan ketidakpatutan terhadap putusan MK, karena setiap Putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat final dan sudah menjadi sebuah UU. Seharusnya MA tidak perlu mengeluarkan SEMA karena dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, dikatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya peninjauan kembali tidak akan menunda pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Berbicara mengenai pidana mati memang tidak akan pernah ada habisnya, selalu saja muncul pendapat yang berbeda dari pihak yang menolak dan menerima hukuman berupa pidana mati tersebut. Banyak sekali terdapat peraturan yang mengatur mengenai pidana mati tersebut namun yang menjadi kekurangannya sekarang adalah menyangkut waktu tunggu eksekusi pidana mati itu sendiri yang belum jelas aturannya. Ditambah lagi dengan adanya putusan MK No 34/PUU-XIII/2013 tentang pembatalan Peninjauan kembali yang ingin lebih mengutamakan asas keadilan tetapi dengan mengesampingkan nilai hukum yang lain yaitu kepastian hukum. Setelah penulis mengkaji dan menganalisis isu-isu hukum terkait waktu tunggu eksekusi pidana mati ini, maka ada beberapa saran yang penulis berikan sebagai berikut :

- a. Kepada pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif untuk secepatnya mengesahkan aturan baru (RUU KUHP) yang ada sehingga permasalahan mengenai waktu eksekusi bisa sedikit teratasi, agar tidak sampai menimbulkan lagi daftar panjang antrian eksekusi pidana mati.

- b. Perlu adanya juga pembaharuan hukum terhadap UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, khususnya yang mengatur tentang jangka waktu penahanan terhadap terpidana mati selama menunggu eksekusi mati sehingga dapat terjamin kepastian hukum.
- c. Mengenai Putusan MK No 34/PUU-XI /2013 tentang Peninjauan kembali yang bisa diajukan lebih dari sekali justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistim pemidanaan sehingga diharapkan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa mendukung *novum* yang ada sehingga pengajuannya tidak harus berkali-kali.